

No. Responden

--	--	--

Wilayah

--

Tipe Pemukiman

--



PENELITIAN :
“POTENSI PEMOLISIAN KOMUNITAS
PADA MASYARAKAT PERKOTAAN”

A. PETUNJUK TEKNIS BAGI TENAGA PEWAWANCARA	2
B. LEMBAR KONTROL	3
C. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PERASAAN AMAN.....	23
D. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KOHESI SOSIAL DI LINGKUNGANNYA	4
E. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KONTROL SOSIAL INFORMAL DI LINGKUNGANNYA ..	5
F. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DI LINGKUNGANNYA	6
G. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT	8
H. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENGAWASAN POLISI OLEH MASYARAKAT	10
I. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM OLEH POLRI.....	11
J. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG AKUNTABILITAS POLRI	14
K. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PERLINDUNGAN HAM OLEH POLRI.....	17
L. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KETANGGAPAN (<i>RESPONSIVENESS</i>) POLRI	19
M. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KESAMAAN POLRI	21
N. RINGKASAN KARAKTERISTIK RESPONDEN.....	23

A. PETUNJUK TEKNIS BAGI TENAGA PEWAWANCARA

Responden penelitian ini adalah anggota masyarakat di empat lokasi di dua wilayah Polda Metro Jaya yaitu lokasi permukiman Real Estate dan Non Real Estate di wilayah Polres Metro Bekasi serta permukiman Real Estate dan Non Real Estate di wilayah Polres Metro Depok. Untuk itu perlu kiranya disepakati bahwa penomoran responden akan di buat sebagai berikut:

Penomoran Responden, yaitu:

Real Estate di Bekasi : 001 s/d 100

Non Real Estate di Bekasi ... : 101 s/d 200

Real Estate di Depok : 201 s/d 300

Non Real Estate di Depok ... : 301 s/d 400

Kotak WILAYAH diisi dengan kode daerah penelitian, yaitu:

Bekasi : 1

Depok : 2

Kotak Tipe Pemukiman diisi dengan kode tipe pemukiman, yaitu:

Real Estate..... : 1

Non Real Estate : 2

Dalam Kuesioner ini bacakan pertanyaan yang dicetak dalam **huruf tebal**, sedangkan yang tidak di cetak dalam huruf tebal tidak perlu dibacakan. Perhatikan kalimat yang ditulis dalam tanda kurung misalnya {{...}} dan <<...>>, kalimat ini tidak perlu dibacakan tetapi merupakan petunjuk yang harus diperhatikan oleh Tenaga Pewawancara.

Untuk kepentingan pengkodean jawaban, pada setiap bagian akhir pilihan jawaban terdapat kotak kode yang hanya boleh diisi oleh koder dengan menggunakan ballpoint/spidol berwarna merah. Interviewer hanya boleh mencoret pilihan jawaban. Interviewer harap memeriksa kembali apakah semua pilihan jawaban telah ditandai atau telah diisi.

Kini sebelum memulai wawancara hendaknya diisi terlebih dahulu tanggal dilakukannya wawancara, serta nama Tenaga Pewawancara dan tanda tangan pewawancara:

Tanggal Wawancara	Pewawancara	Tanda Tangan

B. LEMBAR KONTROL

PENDAHULUAN

Selamat pagi/siang/sore, Saya adalah Pewawancara yang saat ini sedang melakukan survey bagi kepentingan pengumpulan data “POTENSI PEMOLISIAN KOMUNITAS PADA MASYARAKAT PERKOTAAN”.

Survey ini adalah untuk mengetahui potensi-potensi apa yang mendukung Pemolisian Komunitas oleh Polri. Jawaban Anda atas pertanyaan-pertanyaan dalam survey ini sangat penting bagi kami. Perkenankanlah saya mengajukan pertanyaan kepada Anda dan mohon dijawab apa adanya. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Saya mohon agar jawaban Anda adalah benar-benar jujur, karena jawaban Anda akan sangat berharga bagi hasil penelitian yang tepat. Identitas Anda akan kami rahasiakan karena itu kami tidak akan menuliskan nama dan alamat Anda pada lembar pertanyaan ini.

Terima kasih atas kesediaan waktu yang telah Anda berikan.



C. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KOHESI SOSIAL DI LINGKUNGANNYA

Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai hubungan ketetangaan di lingkungan tempat tinggal anda

C.1. Apakah Anda merasa bangga menjadi anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal anda?

1. Sangat tidak bangga
2. Tidak bangga
3. Ragu-ragu
4. Bangga
5. Sangat bangga
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

KohSos_1

C.2. Percayakah anda bahwa semua anggota komunitas di lingkungan anda tinggal saling membantu dalam masalah-masalah ketetangaan?

1. Sangat tidak percaya
2. Tidak percaya
3. Cukup percaya
4. Percaya
5. Sangat percaya
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

KohSos_2

C.3. Setujukah anda bahwa anggota masyarakat di tempat anda tinggal ini telah melakukan kegiatan bersama demi kemajuan lingkungan?

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Ragu-ragu
4. Setuju
5. Sangat setuju
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

KohSos_3

C.4. Menurut pendapat anda seberapa baikkah hubungan antar warga di lingkungan tempat anda tinggal?

1. Sangat tidak baik
2. Tidak baik
3. Cukup baik
4. Baik
5. Sangat baik
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

KohSos_4

C.5. Menurut pendapat anda seberapa seringkah warga masyarakat di lingkungan ini melakukan kegiatan sosial bersama?

1. Sangat jarang
2. Jarang
3. Cukup sering
4. Sering
5. Sangat sering
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

KohSos_5

C.6. Menurut pendapat anda seberapa seringkah warga masyarakat di lingkungan ini saling membantu dalam memecahkan masalah ketetangaan?

1. Sangat jarang
2. Jarang
3. Cukup sering
4. Sering
5. Sangat sering
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

KohSos_6

D. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KONTROL SOSIAL INFORMAL DI LINGKUNGANNYA

Berikutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengenalan lingkungan ketetangaan di lingkungan tempat tinggal anda

D.1. Menurut anda, seberapa banyak warga lingkungan tempat tinggal anda, yang anda kenal dengan baik?

1. Tidak ada warga yang dikenal
2. Mengetahui sedikit warga
3. Mengetahui cukup banyak warga
4. Mengetahui banyak warga
5. Mengetahui semua warga
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

KSosIn_1

D.2. Menurut anda, seberapa banyak anda mengetahui aktivitas warga di lingkungan anda tinggal?

1. Tidak mengetahui
2. Mengetahui sedikit
3. Mengetahui cukup banyak
4. Mengetahui banyak
5. Mengetahui sangat banyak
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

KSosIn_2

D.3. Menurut sepengetahuan anda, bila ada orang asing yang mencurigakan di lingkungan ini apakah warga dapat mengenalinya?

1. Sangat tidak mengenali
2. Tidak mengenali
3. Kurang mengenali
4. Mengenali
5. Sangat mengenali
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

KSosIn_3

D.4. Menurut sepengetahuan anda, seberapa baik warga mengawasi area lingkungan tempat tinggalnya?

1. Tidak baik
2. Kurang baik
3. Cukup baik
4. Baik
5. Sangat baik
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

KSosIn_4

E. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DI LINGKUNGANNYA

Berikutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai partisipasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal anda

E.1. Menurut sepengetahuan anda, seberapa banyak warga yang aktif dalam organisasi sosial di lingkungan ini?

<<organisasi sosial misalnya: kelompok pengajian, arisan warga, karang taruna, dan organisasi lainnya>>

1. Sangat sedikit
2. Sedikit
3. Cukup banyak
4. Banyak
5. Sangat banyak
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

Partis_1

E.2. Menurut sepengetahuan anda, seberapa aktif warga mengikuti pertemuan warga atau organisasi sosial di lingkungan tempat tinggalnya?

1. Sangat tidak aktif
2. Tidak aktif
3. Cukup aktif
4. Aktif
5. Sangat aktif
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

Partis_2

E.3. Apakah anda setuju jika warga diminta untuk ikut bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungannya masing-masing?

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Kurang setuju
4. Setuju
5. Sangat setuju
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

Partis_3

E.4. Menurut sepengetahuan anda, banyakkah warga masyarakat yang memberikan informasi mengenai gangguan Kamtibmas kepada Polri?

1. Tidak banyak
2. Kurang banyak
3. Cukup banyak
4. Banyak
5. Sangat banyak
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

Partis_4

E.5. Menurut pendapat anda, seberapa puaskah masyarakat terhadap layanan Polri secara keseluruhan?

1. Tidak banyak
2. Kurang banyak
3. Cukup banyak
4. Banyak
5. Sangat banyak
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

Partis_5

F. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT

Berikutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kemitraan polisi dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal anda

F.1. Sepengetahuan Anda, apakah Polri pada tingkat satuan kewilayahan setempat sering berdialog dengan tokoh masyarakat dan lembaga yang berpengaruh di masyarakat?

<<Tingkat satuan kewilayahan adalah tingkat satuan kewilayahan Polri yaitu: Polda, Polwil, Polres, Polsek, Pospol>>

1. Tidak pernah
2. Jarang
3. Cukup sering
4. Sering
5. Sangat sering
98. Tidak tahu/Menolak / tidak menjawab

Kemitr_1

F.2. Sepengetahuan Anda, bagaimana kualitas fasilitas dukungan, baik fisik maupun non fisik, yang diberikan oleh Polri kepada kelompok mitranya (FKPM) dalam pemecahan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat setempat?

1. Tidak Baik
2. Kurang Baik
3. Cukup Baik
4. Baik
5. Sangat Baik
98. Tidak Tahu/Menolak / tidak menjawab

Kemitr_2

F.3. Sepengetahuan Anda, apakah Polri telah mendayagunakan dengan baik pengamanan swakarsa masyarakat?

<<Penjelasan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 3 ayat 1 huruf c : Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebeid / ruimte gebeid*) meliputi permukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.>>

1. Tidak mendayagunakan
2. Kurang mendayagunakan
3. Mendayagunakan cukup baik
4. Mendayagunakan dengan baik
5. Mendayagunakan dengan sangat baik
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

Kemitr_3

F.4. Sepengetahuan Anda, apakah Polri telah mendayagunakan dengan baik pertemuan berbagai bentuk komunitas dalam masyarakat?

1. Tidak mendayagunakan
2. Kurang mendayagunakan
3. Mendayagunakan cukup baik
4. Mendayagunakan dengan baik
5. Mendayagunakan dengan sangat baik
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

Kemitr_4

F.5. Menurut pendapat Anda sebaik apa hubungan kemitraan antara Polri dengan tokoh masyarakat atau kelompok yang memiliki potensi untuk bersama-sama memecahkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat setempat dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)?

1. Tidak Baik
2. Kurang Baik
3. Cukup Baik
4. Baik
5. Sangat Baik
98. Tidak Tahu/Menolak /Tidak menjawab

Kemitr_5

F.6. Menurut pendapat Anda, apakah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) efektif dalam memecahkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat setempat?

<< Masalah kamtibmas memiliki spektrum yang luas meliputi masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan masalah tindak pidana>>

1. Tidak efektif
2. Kurang efektif
3. Cukup efektif
4. Efektif
5. Sangat efektif
98. Tidak Tahu/Menolak /Tidak menjawab

Kemitr_6

F.7. Sepengetahuan Anda, apakah Polri telah mendayagunakan dengan baik patroli jalan kaki dalam rangka membangun kemitraan dengan masyarakat?

1. Tidak mendayagunakan
2. Kurang mendayagunakan
3. Mendayagunakan cukup baik
4. Mendayagunakan dengan baik
5. Mendayagunakan dengan sangat baik
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

Kemitr_7

F.8. Bagaimana kerjasama petugas Polri dengan pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam hal ini bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa dalam rangka Pemolisian Masyarakat?

1. Tidak baik
2. Kurang baik
3. Cukup baik
4. Baik
5. Sangat baik
98. Tidak Tahu/Menolak / tidak menjawab

Kemitr_8

G. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENGAWASAN POLISI OLEH MASYARAKAT

Berikutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengawasan polisi oleh masyarakat

G.1. Sepengetahuan anda, dalam pertemuan FKPM, seberapa seringkah membahas mengenai kinerja Polri?

1. Tidak pernah
2. Jarang
3. Cukup sering
4. Sering
5. Sangat sering
98. Tidak Tahu/Menolak / tidak menjawab

PengSi_1

G.2. Sepengetahuan anda, dalam pertemuan FKPM, seberapa seringkah membahas kemajuan kegiatan bersama dengan Polri?

1. Tidak pernah
2. Jarang
3. Cukup sering
4. Sering
5. Sangat sering
98. Tidak Tahu/Menolak / tidak menjawab

PengSi_2

G.3. Sepengetahuan anda, perlukah ada semacam badan yang mengawasi Polri di tingkat Polsek / Kecamatan?

1. Sangat tidak perlu
2. Tidak perlu
3. Kurang perlu
4. Perlu
5. Sangat perlu
98. Tidak Tahu/Menolak / tidak menjawab

PengSi_3

G.4. Menurut pendapat anda, dalam kondisi masyarakat saat ini, siapkah masyarakat untuk mengawasi Polri?

1. Sangat tidak siap
2. Tidak siap
3. Kurang siap
4. Siap
5. Sangat siap
98. Tidak Tahu/Menolak / tidak menjawab

PengSi_4

H. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM OLEH POLRI

Berikutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai penegakan supremasi hukum oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya

H.1. Menurut pendapat anda apakah Polri dalam tindakan kepolisiannya menghormati hukum?

<<Tindakan kepolisian adalah kewenangan Polri dalam bidang proses pidana sesuai Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981>>

1. Sangat tidak menghormati hukum
2. Tidak menghormati hukum
3. Kurang menghormati hukum
4. Menghormati hukum
5. Sangat menghormati hukum
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

SupHuk_1

H.2. Apakah Anda percaya bahwa Polri dalam melaksanakan tindakan kepolisian di bidang proses pidana sudah sesuai dengan prosedur hukum/petunjuk pelaksanaan praktek operasional?

<<Tindakan kepolisian adalah kewenangan Polri dalam bidang proses pidana sesuai Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981>>

1. Sangat tidak percaya
2. Tidak percaya
3. Ragu-ragu
4. Percaya
5. Sangat percaya
98. Tidak tahu/Menolak / tidak menjawab

SupHuk_2

H.3. Menurut pendapat Anda, apakah Polri memiliki ketaatan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang untuk praktek operasional?

1. Sangat tidak taat
2. Tidak taat
3. Kurang taat
4. Taat
5. Sangat taat
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

SupHuk_3

H.4. Menurut pendapat Anda, apakah Polri mendukung prinsip-prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membedakan, keadilan dan profesionalisme?

<<Prinsip-prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membedakan, keadilan dan profesionalisme tersebut meliputi aspek kebijakan dan/atau aspek operasi>>

1. Sangat tidak mendukung
2. Tidak mendukung
3. Kurang mendukung
4. Mendukung
5. Sangat mendukung
98. Tidak Tahu/Menolak /Tidak menjawab

SupHuk_4

H.5. Menurut pendapat Anda, apakah Polri dalam menegakkan hukum memandang status sosial atau pengaruh politis seseorang?

1. Sangat memandang
2. Memandang
3. Kurang memandang
4. Tidak memandang
5. Sangat tidak memandang
98. Tidak tahu/Menolak/Tidak menjawab

SupHuk_5

H.6. Menurut pendapat Anda, apakah Polri menjaga disiplin dan efisiensi dalam melakukan tindakan kepolisian?

<<Disiplin anggota polri adalah seperti diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia>>

<<Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Menurut definisi ini, efisiensi terdiri atas 2 unsur yaitu kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut>>

1. Sangat tidak disiplin dan tidak efisien
2. Tidak disiplin dan tidak efisien
3. Cukup disiplin dan efisien
4. Disiplin dan efisien
5. Sangat disiplin dan efisien
98. Tidak tahu/Menolak / tidak menjawab

SupHuk_6

H.7. Menurut Anda apakah Polri telah memperhatikan kebijakan tentang penggunaan kekuatan minimum dalam tindakan kepolisiannya?

<<Penggunaan kekuatan minimum (represif non yustisial) mensyaratkan respons yang proporsional dengan ancaman. Penggunaan kekuatan minimum harus diseimbangkan dengan kebutuhan untuk meminimalkan biaya kerusakan>>

1. Sangat tidak memperhatikan
2. Tidak memperhatikan
3. Cukup memperhatikan
4. Memperhatikan
5. Sangat memperhatikan
98. Tidak Tahu/Menolak / tidak menjawab

SupHuk_7

H.8. Menurut pendapat Anda apakah terdapat perbedaan yang jelas antara Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Polri dengan Tugas Pokok dan Tanggung Jawab TNI, khususnya dalam implementasinya di lapangan?

<<Tugas pokok Polri adalah: 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. menegakkan hukum, 3. melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat>>

<<Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok dilakukan dengan: (a) operasi militer untuk perang; dan (b) operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. Ketentuan Tugas Pokok TNI dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara>>

1. Tidak jelas
2. Kurang jelas
3. Cukup jelas
4. Jelas
5. Sangat jelas
98. Tidak tahu/Menolak / tidak menjawab

SupHuk_8

I. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG AKUNTABILITAS POLRI

Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai apa yang saudara ketahui tentang Akuntabilitas Polri

I.1. Menurut Anda, apakah tindakan para petugas Polri perlu diawasi oleh pengawas dari lingkungan Polri sendiri?

1. Tidak perlu
2. Tidak terlalu perlu
3. Ragu-ragu
4. Perlu
5. Sangat perlu
98. Tidak Tahu/Menolak /Tidak menjawab

Akunta_1

I.2. Tahukah Anda bahwa Polri sudah memiliki badan pengawas dari lingkungan Polri sendiri?

<<Di tingkat Mabes adalah Irwasum (Inspektur Pengawas Umum) dan Divisi Propam/Provost sedangkan di tingkat Polda adalah Irwasda (Inspektur Pengawas Daerah) dan Bid Propam>>

1. Tidak tahu
2. Kurang mengetahui
3. Cukup mengetahui
4. Mengetahui
5. Sangat mengetahui
98. Tidak Tahu/Menolak /Tidak menjawab

Akunta_2

I.3. Menurut pendapat Anda, apakah tindakan para petugas Polri perlu diawasi oleh pengawas dari luar lingkungan Polri?

1. Tidak perlu
2. Tidak terlalu perlu
3. Ragu-ragu
4. Perlu
5. Sangat perlu
98. Tidak Tahu/Menolak /Tidak menjawab

Akunta_3

I.4. Tahukah Anda bahwa sudah ada badan pengawas dari luar lingkungan Polri yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang tugasnya antara lain mengawasi kinerja Polri dan tindakan para petugas Polri?

<<Yang dimaksud badan pengawas dari luar lingkungan Polri yang dibentuk berdasarkan undang-undang antara lain adalah Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Nasional HAM, DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan>>

1. Tidak tahu
2. Kurang tahu
3. Cukup tahu
4. Tahu
5. Sangat tahu
98. Tidak Tahu/Menolak /Tidak menjawab

Akunta_4

I.5. Tahukah Anda bahwa sudah ada badan pengawas dari luar lingkungan Polri bentukan masyarakat, yang kegiatannya antara lain mengawasi kinerja Polri dan tindakan para petugas Polri?

<<Badan pengawas dari luar lingkungan Polri yang dibentuk oleh masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain adalah Indonesian Crime Prevention Foundation (LCKI), Police Watch, YLBHI, Gamatpol, Kontras, Komisi Kepolisian Indonesia, dll >>

1. Tidak tahu
2. Kurang tahu
3. Cukup tahu
4. Tahu
5. Sangat tahu
98. Tidak Tahu/Menolak /Tidak menjawab

Akunta_5

I.6. Menurut Anda apakah masyarakat mudah memperoleh informasi yang sebenarnya tentang kinerja dan kegiatan-kegiatan Polri yang boleh diketahui oleh Publik?

<<Hal-hal yang boleh diketahui oleh publik antara lain adalah informasi pelayanan publik, biaya pengurusan surat ijin/surat keterangan, perkembangan tindak lanjut kasus yang telah dilaporkan>>

1. Sangat sulit
2. Agak sulit
3. Cukup mudah
4. Mudah
5. Sangat mudah
98. Tidak Tahu/Menolak /Tidak menjawab

Akunta_6

I.7. Menurut pendapat Anda, apakah Polri sudah memberikan informasi yang memadai terhadap permintaan informasi dari kelompok-kelompok masyarakat, media massa dan lainnya?

1. Sangat tidak memadai
2. Tidak memadai
3. Cukup memadai
4. Memadai
5. Sangat memadai
98. Tidak tahu/Menolak / tidak menjawab

Akunta_7

I.8. Menurut pendapat Anda, apakah Polri sudah memberikan respon yang memadai terhadap keluhan, laporan, dan pengaduan masyarakat?

1. Sama sekali tidak memadai
2. Belum, masih kurang memadai
3. Ragu-ragu
4. Memadai
5. Sangat memadai
98. Tidak tahu/Menolak / tidak menjawab

Akunta_8

I.9. Tahukah anda bahwa telah ada Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) yaitu badan khusus yang kewenangannya antara lain menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Polri dan tindakan para petugas Polri?

<<Jenis keluhan masyarakat antara lain: penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, diskresi yang keliru, pelayanan yang buruk, perlakuan yang diskriminatif>>

1. Tidak tahu
2. Kurang tahu
3. Cukup tahu
4. Tahu
5. Sangat tahu
98. Tidak Tahu/Menolak /Tidak menjawab

Akunta_9

J. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PERLINDUNGAN HAM OLEH POLRI

Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai apa yang saudara ketahui tentang Perlindungan HAM oleh Polri

J.1. Setujukah Anda, bahwa tindakan Polri saat ini dalam melayani masyarakat sudah menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia?

<<Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Contoh hak asasi manusia (HAM): (i) Hak untuk hidup; (ii) Hak untuk memperoleh pendidikan; (iii) Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain; (iv) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama; dan (v) Hak untuk mendapatkan pekerjaan.

<<Prinsip perlindungan HAM adalah (i) *universality*, yaitu hak asasi ini adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia; (ii) setiap orang memiliki hak yang sama (*equality*) dan tanpa diskriminasi (*non-discrimination*), yaitu setiap orang yang dilahirkan secara bebas dan memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan karena alasan tertentu. Secara bebas dan memiliki hak yang sama ini artinya bahwa semua orang tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya; dan (iii) Pengakuan *indivisibility and interdependence of different rights*, yaitu dalam rangka memenuhi hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan antara pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Karena ruang lingkup dari kedua bidang hak ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Artinya memastikan pemenuhan stAndart minimal yaitu hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah sangat penting dalam upaya menjamin dapat menikmatinya hak-hak sipil dan politik. Sebaliknya pembangunan hak-hak sipil dan politik juga tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya>>

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Ragu-ragu
4. Setuju
5. Sangat setuju
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

LinHAM_1

J.2. Menurut Anda, apakah Polri dalam setiap tindakannya proporsional dalam rangka melindungi hak asasi manusia?

<<Tindakan proporsional adalah tindakan yang tidak berlebihan, tepat dan masuk akal, mempertimbangkan alternatif tindakan yang paling ringan bahkan tidak melakukan tindakan sama sekali>>

1. Tidak proporsional
2. Kurang proporsional
3. Cukup proporsional
4. Proporsional
5. Sangat proporsional
98. Tidak Tahu/Menolak / tidak menjawab

LinHAM_2

J.3. Menurut pendapat Anda, apakah Polri dalam memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan, dalam rangka melindungi hak asasi manusia, sudah memadai?

<<Yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban. Kelompok rentan terdiri atas: (a) Anak-anak; (b) Remaja; (c) Perempuan (khusus yang menjalankan fungsi reproduksi); (d) Lanjut usia; (e) Penyandang cacat (*difable*); (f) Komunitas adat terpencil; (g) Kelompok minoritas; (h) Pengungsi dan pengungsi internal; (i) Tahanan dan narapidana; (j) Orang miskin desa dan kota; (k) Orang yang mengalami gangguan kejiwaan; (l) Orang yang terdiskriminasi; (m) Orang yang tersubordinasi; (n) Orang yang termajinakan; (o) Petani yang tidak mempunyai tanah; (p) Buruh tani; (q) Nelayan miskin; (r) Pekerja migran; (s) Penganggur; (t) Dan lain-lain. Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Rentan, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM>>

1. Tidak memadai
2. Kurang memadai
3. Cukup memadai
4. Memadai
5. Sangat memadai
98. Tidak tahu/Menolak / tidak menjawab

LinHAM_3

J.4. Menurut pendapat Anda apakah Polri dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan tindakan pencegahan?

1. Tidak mengutamakan
2. Kurang mengutamakan
3. Cukup mengutamakan
4. Mengutamakan
5. Sangat mengutamakan
98. Tidak tahu/Menolak / tidak menjawab

LinHAM_4

J.5. Menurut pendapat Anda, apakah dukungan negara bagi pelaksanaan tugas Polri sudah memadai?

<<Dukungan negara yaitu dukungan personil, anggaran, dan peralatan>>

1. Sangat tidak memadai
2. Tidak memadai
3. Cukup memadai
4. Memadai
5. Sangat memadai
98. Tidak tahu/Menolak / tidak menjawab

LinHAM_5

K. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KETANGGAPAN (RESPONSIVENESS) POLRI

Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai apa yang saudara ketahui tentang ketanggapan (*responsiveness*) Polri

K.1. Menurut pendapat Anda, bagaimanakah kecepatan Polri dalam merespons panggilan darurat?

<<Panggilan darurat adalah panggilan yang membutuhkan kehadiran Polisi dengan segera, misalnya panggilan karena terjadinya ancaman teror, kerusuhan, kecelakaan lalu lintas, perampokan, pencurian, penjambratan, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain>>

1. Tidak cepat
2. Kurang cepat
3. Cukup cepat
4. Cepat
5. Sangat cepat
98. Tidak Tahu/Menolak/Tidak menjawab

TanGap_1

K.2. Menurut pendapat Anda, bagaimanakah tingkat kepuasan publik terhadap sikap tanggap Polri dalam merespons panggilan darurat?

1. Sangat tidak puas
2. Tidak puas
3. Cukup puas
4. Puas
5. Sangat puas
98. Tidak Tahu/Menolak /Tidak menjawab

TanGap_2

K.3. Sepengetahuan Anda, banyakkah keluhan dari masyarakat terhadap Polri terkait dengan pemberian pelayanan?

1. Sangat banyak
2. Banyak
3. Cukup Banyak
4. Jarang
5. Tidak ada
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

TanGap_3

K.4. Bagaimana kerjasama petugas Polri dengan pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam hal ini Kepolisian Khusus dalam rangka Pemolisian Masyarakat?

<<Kerjasama dalam bentuk koordinasi, pengawasan, dan bantuan teknis>>

<<Kepolisian Khusus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (Peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknis lainnya. Contoh Kepolisian Khusus antara lain adalah Polsus Kehutanan, Polsus Imigrasi, Satpol PP>>

1. Tidak baik
2. Kurang baik
3. Cukup baik
4. Baik
5. Sangat baik
98. Tidak Tahu/Menolak / tidak menjawab

TanGap_4

K.5. Bagaimana kerjasama petugas Polri dengan pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka Pemolisian Masyarakat (Polmas)?

<<Kerjasama dalam bentuk koordinasi, pengawasan, dan bantuan teknis>>

<<Contoh Penyidik Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah Imigrasi, Bea Cukai, Bapedalda, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Satpol PP, dsb >>

1. Tidak baik
2. Kurang baik
3. Cukup baik
4. Baik
5. Sangat baik
98. Tidak Tahu/Menolak / tidak menjawab

TanGap_5

L. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KESAMAAN POLRI

Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai apa yang saudara ketahui tentang kesamaan Polri dalam kehidupan demokratis

L.1. Apakah Anda setuju dengan pendapat bahwa: “Polri di masa kini telah melindungi hak-hak politik demokratis rakyat”?

<<Hak politik demokratis rakyat antara lain hak menyampaikan pendapat, berunjuk rasa, berserikat dan berkumpul, serta dipilih dan memilih>>

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Ragu-ragu
4. Setuju
5. Sangat setuju
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

Kesama_1

L.2. Sepengetahuan Anda, seberapa sering terjadi kerusuhan dalam kegiatan demonstrasi, pertemuan politik, dan konsentrasi massa/rapat umum?

1. Sangat sering
2. Sering
3. Cukup sering
4. Jarang
5. Tidak pernah
98. Tidak tahu/Menolak/Tidak menjawab

Kesama_2

L.3. Dalam hal terjadi kerusuhan dalam kegiatan demonstrasi, pertemuan politik, dan konsentrasi massa/rapat umum, memadaikah reaksi/tindakan Polisi dalam memberikan pengamanan?

1. Tidak memadai
2. Kurang memadai
3. Cukup memadai
4. Memadai
5. Sangat memadai
98. Tidak tahu/Menolak/Tidak menjawab

Kesama_3

L.4. Menurut pendapat Anda, apakah Polri dalam menggunakan kekuatan fisik menghadapi unjuk rasa tetap memperhatikan kemerdekaan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul?

<<Yang dimaksud dengan memperhatikan kemerdekaan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul antara lain dalam bentuk dialog, negosiasi, memberi kesempatan berorasi>>

1. Tidak memperhatikan
2. Kurang memperhatikan
3. Cukup memperhatikan
4. Memperhatikan
5. Sangat memperhatikan
98. Tidak Tahu/Menolak / tidak menjawab

Kesama_4

L.5. Menurut pendapat Anda, banyakkah keluhan atau tuntutan hukum terhadap Polri terkait penggunaan kekuatan fisik dalam menanggulangi kerusuhan pada demonstrasi, pertemuan politik dan konsentrasi massa/rapat umum?

<<Penggunaan kekuatan fisik yang mengakibatkan kematian, luka-luka, kerugian material>>

1. Sangat banyak
2. Banyak
3. Cukup banyak
4. Tidak banyak
5. Tidak ada
98. Tidak Tahu/Menolak/Tidak menjawab

Kesama_5

L.6. Menurut pendapat Anda, tanggapakah Polri terhadap banyaknya keluhan, atau tuduhan sehubungan dengan penggunaan kekuatan fisik dalam menanggulangi kerusuhan pada demonstrasi, pertemuan politik dan konsentrasi massa/rapat umum?

1. Tidak tanggap
2. Kurang tanggap
3. Cukup tanggap
4. Tanggap
5. Sangat tanggap
98. Tidak Tahu/Menolak/Tidak menjawab

Kesama_6

M. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PERASAAN AMAN

Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai perasaan aman di lingkungan tempat tinggal anda

M.1. Menurut perasaan anda bagaimanakah keamanan diri dan keluarga anda di lingkungan tempat tinggal anda?

1. Sangat rawan
2. Rawan
3. Cukup aman
4. Aman
5. Sangat aman
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

RasaAm_1

M.2. Menurut pendapat anda bagaimanakah kondisi Kamtibmas di lingkungan tempat tinggal anda setelah penerapan Pemolisian Masyarakat (Polmas)?

1. Lebih rawan
2. Rawan
3. Biasa saja
4. Aman
5. Lebih aman
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

RasaAm_2

M.3. Setujukah anda bahwa setelah penerapan Polmas masyarakat menjadi lebih giat menjaga keamanan lingkungan?

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Kurang setuju
4. Setuju
5. Sangat setuju
98. Tidak Tahu/Tidak menjawab

RasaAm_3

N. RINGKASAN KARAKTERISTIK RESPONDEN

Dalam bagian terakhir ini, saya akan mengajukan sejumlah pertanyaan tentang latar belakang kehidupan Anda.

N.1. Jenis kelamin responden?

1. Laki-laki
2. Perempuan

KarRes_1

N.2. Berapakah umur Anda saat ini?

1. 16 s/d 18 tahun
2. 19 s/d 25 tahun
3. 26 s/d 35 tahun
4. 36 s/d 45 tahun
5. > 45 tahun

KarRes_2

N.3. Apakah status pekerjaan Anda saat ini?

<<Pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan uang>>

1. Bekerja {{Lanjutkan ke N.4.}}
2. Tidak bekerja {{Lanjutkan ke N.10.}}

KarRes_3

N.4. Jika Anda bekerja apakah pekerjaan Anda saat ini?

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)..... {{Lanjut ke N.5.}}
2. Anggota TNI {{Lanjut ke N.6.}}
3. Anggota Polri {{Lanjut ke N.7.}}
4. Pegawai swasta/BUMN/BUMD ... {{Lanjut ke N.8.}}
5. Pengusaha/wiraswasta..... {{Lanjut ke N.9.}}
6. Pedagang {{Lanjut ke N.15.}}
7. Petani/Nelayan {{Lanjut ke N.15.}}
8. Lainnya {{Lanjut ke N.15.}}

KarRes_4

N.5. Jika Anda Pegawai Negeri Sipil apakah golongan anda saat ini?

1. Golongan I..... {{Lanjut ke N.15.}}
2. Golongan II..... {{Lanjut ke N.15.}}
3. Golongan III..... {{Lanjut ke N.15.}}
4. Golongan IV {{Lanjut ke N.15.}}
99. Tidak Relevan..... {{Lanjut ke N.15.}}

KarRes_5

N.6. Jika Anda anggota TNI apakah pangkat anda saat ini?

1. Tamtama..... {{Lanjut ke N.15.}}
2. Bintara {{Lanjut ke N.15.}}
3. Perwira Pertama {{Lanjut ke N.15.}}
4. Perwira Menengah {{Lanjut ke N.15.}}
5. Perwira Tinggi {{Lanjut ke N.15.}}
99. Tidak Relevan..... {{Lanjut ke N.15.}}

KarRes_6

N.7. Jika Anda anggota Polri apakah pangkat anda saat ini?

1. Bintara {{Lanjut ke N.15.}}
2. Perwira Pertama {{Lanjut ke N.15.}}
3. Perwira Menengah..... {{Lanjut ke N.15.}}
4. Perwira Tinggi..... {{Lanjut ke N.15.}}
99. Tidak Relevan {{Lanjut ke N.15.}}

KarRes_7

N.8. Jika Anda pegawai swasta/BUMN/BUMD apakah pangkat / Jabatan anda saat ini?

1. Pelaksana..... {{Lanjut ke N.15.}}
2. Supervisor {{Lanjut ke N.15.}}
3. Manajer {{Lanjut ke N.15.}}
99. Tidak Relevan {{Lanjut ke N.15.}}

KarRes_8

N.9. Jika Anda pengusaha / wiraswasta berapakah jumlah pegawai anda saat ini?

1. Tidak lebih dari 4 orang..... {{Lanjut ke N.15.}}
2. 5 sampai 19 orang {{Lanjut ke N.15.}}
3. 20 sampai 99 orang..... {{Lanjut ke N.15.}}
4. Lebih dari 99 orang {{Lanjut ke N.15.}}
99. Tidak Relevan {{Lanjut ke N.15.}}

KarRes_9

N.10. Jika tidak bekerja apakah status Anda saat ini?

1. Pensiun Pegawai Negeri Sipil {{Lanjut ke N.11.}}
2. Pensiun TNI {{Lanjut ke N.12.}}
3. Pensiun POLRI {{Lanjut ke N.13.}}
4. Pensiun pegawai swasta/BUMN/BUMD. {{Lanjut ke N.14.}}
5. Pelajar/mahasiswa..... {{Lanjut ke N.15.}}
6. Ibu rumah tangga {{Lanjut ke N.15.}}
7. Masih mencari pekerjaan..... {{Lanjut ke N.15.}}
8. Lainnya {{Lanjut ke N.15.}}

KarRes_10

N.11. Jika Anda pensiunan Pegawai Negeri Sipil apakah golongan terakhir anda?

1. Golongan I {{Lanjut ke N.15.}}
2. Golongan II {{Lanjut ke N.15.}}
3. Golongan III {{Lanjut ke N.15.}}
4. Golongan IV..... {{Lanjut ke N.15.}}
99. Tidak Relevan {{Lanjut ke N.15.}}

KarRes_11

N.12. Jika Anda pensiunan anggota TNI apakah pangkat terakhir anda?

1. Tamtama..... {{Lanjut ke N.15.}}
2. Bintara {{Lanjut ke N.15.}}
3. Perwira Pertama {{Lanjut ke N.15.}}
4. Perwira Menengah {{Lanjut ke N.15.}}
5. Perwira Tinggi..... {{Lanjut ke N.15.}}
99. Tidak Relevan..... {{Lanjut ke N.15.}}

KarRes_12

N.13. Jika Anda pensiunan anggota Polri apakah pangkat terakhir anda?

1. Bintara {{Lanjut ke N.15.}}
2. Perwira Pertama {{Lanjut ke N.15.}}
3. Perwira Menengah {{Lanjut ke N.15.}}
4. Perwira Tinggi..... {{Lanjut ke N.15.}}
99. Tidak Relevan..... {{Lanjut ke N.15.}}

KarRes_13

N.14. Jika Anda pensiunan pegawai swasta/BUMN/BUMD apakah pangkat / Jabatan terakhir anda?

1. Pelaksana
2. Supervisor
3. Manajer
99. Tidak Relevan

KarRes_14

N.15. Apakah tingkat pendidikan terakhir Anda?

1. Lulus pendidikan menengah pertama (SLTP atau sederajat)
2. Lulus pendidikan menengah atas (SLTA atau sederajat)
3. Lulus Akademi, D3, atau sederajat
4. Lulus pendidikan tinggi (S1)
5. Lulus paska sarjana (S2 dan S3)
98. Menolak / tidak menjawab

KarRes_15

Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Anda dan saya menghargai waktu yang telah Anda luangkan untuk menyelesaikan survey ini.

Editor	Coder	QC	Entry
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

LAMPIRAN 2

Variabel dan Indikator Potensial Bagi Penelitian Tataran Kebijakan, Peraturan-Perundangan dan Regulasi serta Tataran Empiris Tentang Pengawasan Sipil dan Relasi Kekuasaan antara Polisi dan Masyarakat

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
SUPREMASI HUKUM & PELAYANAN DEMOKRATIS			
Menghormati dan memegang teguh aturan hukum.			
<input type="checkbox"/> Polisi memiliki kejelasan mengenai parameter hukum untuk praktek operasional seperti (i) penghentian dan pemeriksaan tanda pengenal, (ii) pemanggilan, (iii) penggeledahan, (iv) penangkapan, (v) penyitaan, (vi) penahanan (vii) pemeriksaan, dan pemolisian komunitas	Pejabat Kepolisian Kopolnas DPR	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Ketaatan polisi terhadap parameter hukum untuk praktek operasional, termasuk juga pemolisian komunitas	Pejabat Kepolisian Kopolnas DPR	Kualitatif	Wawancara mendalam dan
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
Polisi, dalam kebijakan dan operasinya, termasuk pemolisian komunitas, mendukung prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan, keadilan dan profesionalisme .			
<input type="checkbox"/> Di kantor polisi, Kebijakan dan informasi mengenai cara-cara melakukan pengaduan ditampilkan secara jelas.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Petugas polisi diambil sumpah setia untuk menegakkan nilai-nilai.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
Secara tegas, pimpinan menanamkan prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan, keadilan dan profesionalisme dalam kebijakan dan operasi, termasuk pemolisian komunitas			
<input type="checkbox"/> Nilai-nilai, seperti pernyataan misi atau pernyataan tentang nilai, kode etik dan aturan kedisiplinan, dimasukkan dalam dokumen inti pelayanan polisi, termasuk pemolisian komunitas	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan, keadilan dan profesionalisme dalam kebijakan dan operasinya melalui berbagai tindakan, termasuk pemolisian komunitas.			
<input type="checkbox"/> Ada pelatihan-pelatihan yang membuat petugas kepolisian dan pegawai lain sadar akan nilai bersama.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Diambil langkah-langkah untuk memperkuat nilai-nilai tersebut melalui komunikasi secara teratur yang diberikan oleh pimpinan, atau dalam arahan kerja oleh pengawas.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
<input type="checkbox"/> Manajemen dan praktek operasional mendukung ketaatan terhadap nilai-nilai tersebut melalui tindakan positif yang ditujukan untuk membantu ketaatan polisi seperti kenaikan pangkat dan penilaian kinerja, melalui evaluasi lain, dan melalui peringatan dan sanksi dalam kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai tersebut.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
AKUNTABILITAS/TRANSPARANSI			
Akuntabilitas Internal			
Memastikan kinerja kesatuan dan perilaku anggota dapat dipertanggungjawabkan.			
<input type="checkbox"/> Memiliki rantai komando yang jelas dan efektif, khususnya dalam pengawasan lini pertama petugas kepolisian.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Memiliki badan pengawas internal di setiap tingkatan kesatuan dengan mekanisme pengawasan yang transparan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Memiliki sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi yang transparan sesuai dengan standar profesional.	Pejabat Kepolisian Masyarakat	Kualitatif Kuantitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Memiliki strategi/perencanaan dan prosedur yang jelas tentang pelaksanaan tugas pokok di setiap tingkatan kesatuan dan menetapkan sasaran kinerja menurut strategi yang ada	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Memiliki sistem pelaporan yang berlaku bagi setiap tingkatan kesatuan dan setiap pejabat kepolisian	Pejabat Kepolisian Masyarakat	Kualitatif Kuantitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Memiliki sistem penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas perorangan/kesatuan berdasarkan tolok ukur yang telah dibakukan untuk memberikan reward & punishment yang jelas	Pejabat Kepolisian Masyarakat	Kualitatif Kuantitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur
Akuntabilitas Kepada Negara			
Memiliki mekanisme penetapan arah kebijakan kepolisian berdasarkan undang-undang.			
<input type="checkbox"/> Adanya arah kebijakan kepolisian yang dibuat oleh otoritas sipil.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Adanya badan yang bertugas menyiapkan bahan untuk penetapan arah kebijakan kepolisian	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Kebijakan teknis kepolisian ditetapkan sesuai arah kebijakan kepolisian yang dibuat oleh otoritas sipil.	Pejabat Kepolisian Masyarakat	Kualitatif Kuantitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur
Anggota polisi tunduk pada kekuasaan peradilan umum			
<input type="checkbox"/> Anggota Polri tunduk pada kitab undang-undang hukum pidana dan hukum acara pidana.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
<input type="checkbox"/> Anggota Polri tunduk pada hukum perdata	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Anggota Polri tunduk pada hukum tata usaha negara	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa polisi mematuhi kekuasaan pengadilan – termasuk kehadiran untuk bersaksi bila diperlukan; kualitas kesaksian; kualitas kasus yang diajukan ke pengadilan; dalam rangka memenuhi perintah pengadilan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Mekanisme pengawasan kepolisian oleh lembaga legislatif / DPR.			
<input type="checkbox"/> Badan legislatif memiliki komisi khusus untuk pengawasan kebijakan dan pelaksanaan tugas kepolisian sesuai ketentuan perundang-undangan.	Pejabat Kepolisian DPR	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Keteraturan pengawasan DPR terhadap polisi melalui mekanisme rapat kerja polri dengan DPR.(komisi yang menjadi mitra kerja polri).	Pejabat Kepolisian DPR	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> DPR dengan hak budget menetapkan alokasi anggaran kepolisian dan mengawasi pelaksanaannya.	Pejabat Kepolisian DPR	Kualitatif	Wawancara mendalam
Pengawasan pelaksanaan anggaran dan manajemen keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			
<input type="checkbox"/> Memiliki satuan organisasi yang membidangi fungsi pengawasan anggaran dan keuangan dan menjadi mitra BPK	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Akuntabilitas kepada Publik			
Respon cepat terhadap panggilan darurat.			
<input type="checkbox"/> Polisi harus memperkenalkan diri dan mengenakan papan atau label nama, atau menunjukkan identitas kepada anggota masyarakat umum.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Waktu tanggapan terhadap panggilan darurat.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Tingkat kepuasan publik terhadap tanggapan polisi untuk keadaan darurat.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
Memiliki sistem yang terpercaya untuk mencatat informasi untuk evaluasi kinerja dan terhadap perilaku individual, dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat umum.			
<input type="checkbox"/> Polisi memiliki sistem pencatatan informasi mengenai kinerja dan perilaku anggotanya, dan menyediakan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memastikan atau memperbaiki keandalan sistem ini.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
<input type="checkbox"/> Informasi yang diperoleh melalui sistem ini disediakan untuk badan pengawas dan umum, tanpa memperhatikan apakah hasilnya akan memberikan citra positif terhadap pelayanan polisi atau tidak.	Pejabat Kepolisian Kopolnas	Kualitatif Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
Mendukung pengawasan dari luar dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat pengamat kepolisian, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat perorangan serta komunitas di tempat tugasnya.			
<input type="checkbox"/> Laporan tahunan dan laporan lain tentang kinerja dan perilaku polisi dapat diakses masyarakat umum.	Pejabat Kepolisian Kopolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Hubungan antara polisi dan organisasi masyarakat pengamat kepolisian menggambarkan kerjasama, kemitraan yang harmonis dan manajemen yang efektif.	Pejabat Kepolisian Kopolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Menanggapi dengan positif permintaan informasi dari forum masyarakat, media dan lainnya.	Pejabat Kepolisian Tokoh Masyarakat Media Massa	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Petugas Senior bersedia ditemui masyarakat umum dan mendorong adanya dialog.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Terdapat prosedur yang jelas untuk persetujuan penelitian, dan memberikan akses bagi peneliti masalah kepolisian.	Pejabat Kepolisian LSM/Universitas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Transparansi ditingkatkan misalnya dengan membuat website polisi dengan informasi yang berkualitas: akses terhadap pelatihan polisi oleh anggota organisasi masyarakat pengamat kepolisian atau masyarakat, dan lain-lain.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
Akuntabilitas kepada Badan Pengawas Eksternal Independen			
Terdapat badan pengawasan independen untuk menyelidiki pengaduan mengenai polisi, dengan kekuatan hukum, sumber daya anggaran dan staff yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.			
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki kebebasan yang cukup dalam menghadapi segala bentuk campur tangan dan politik dari polisi.	Pejabat Kepolisian Kopolnas/Badan Pengawas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan bahwa tuduhan terhadap polisi diselidiki sebaik-baiknya.	Pejabat Kepolisian Kopolnas/Badan pengawas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Anggota badan pengawas mendapat perlindungan terhadap intimidasi dari polisi dan pihak yang lain.	Pejabat Kepolisian Badan pengawas	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki kekuasaan untuk meminta kerjasama dari polisi, termasuk kekuasaan untuk meminta petugas yang tidak disebutkan namanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyelidikan terhadap petugas lain.	Pejabat Kepolisian Kopolnas/Badan pengawas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki kekuasaan untuk melakukan kunjungan ke kantor polisi tanpa pemberitahuan, menyelidiki fasilitas kepolisian, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penahanan.	Pejabat Kepolisian Kopolnas/Badan pengawas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Polisi memenuhi permintaan informasi dari badan pengawas, kecuali ada alasan mendasar yang membuatnya tidak perlu memberikan jawaban.	Pejabat Kepolisian Kopolnas/Badan pengawas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Polisi memiliki kewajiban yang jelas dalam menanggapi rekomendasi yang dibuat oleh badan pengawas.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan laporan independen.	Kopolnas/Badan pengawas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki anggaran yang memadai untuk menggaji sejumlah personel dengan keahlian yang sesuai	Kopolnas/Badan pengawas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki petugas dengan keahlian yang dibutuhkan untuk tugas yang harus mereka kerjakan.	Kopolnas/Badan pengawas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Dibutuhkan badan pengawas pada tingkat lokal (Propinsi/Kabupaten kota/Kecamatan) guna meningkatkan efektivitas pengawasan kepada polisi	Pejabat Polisi Kopolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
Kerjasama polisi dengan badan pengawas yang bertanggung jawab untuk memantau atau menyelidiki dugaan perilaku polisi yang menyimpang.			
<input type="checkbox"/> Lembaga kepolisian memberikan informasi kepada badan pengawas mengenai langkah-langkah yang diambil menindaklanjuti rekomendasi badan pengawas.	Pejabat Kepolisian Kopolnas/Badan Pengawas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Dukungan aktif polisi bagi lembaga pengawas dalam menjalankan peran pengawasannya.	Pejabat Kepolisian Kopolnas/Badan Pengawas	Kualitatif	Wawancara mendalam
KETANGGAPAN (RESPONSIVENESS)			
Menggunakan mekanisme yang efektif dalam dialog polisi-masyarakat, jangkauan yang luas dan kerjasama.			
<input type="checkbox"/> Polisi pada tingkat lokal dan tingkat yang lain berusaha mencari orang dan lembaga yang memiliki peranan menonjol di masyarakat dan mengajak mereka dalam dialog (tercermin dalam pertemuan konsultatif yang rutin dan cakupan kelompok yang bergabung).	Pejabat Kepolisian Masyarakat	Kualitatif Kuantitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
<input type="checkbox"/> Polisi berusaha mencari dan membangun kemitraan dengan orang atau kelompok yang memiliki potensi untuk membantu dalam kegiatan pencegahan kejahatan (tercermin dalam kemajuan yang dicapai dalam pengurangan masalah kejahatan melalui kemitraan).	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Memanfaatkan pengamanan swadaya masyarakat atau strategi khusus seperti pertemuan sektoral atau patroli jalan kaki.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Petugas polisi berperan serta dalam kegiatan masyarakat.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Menerima informasi yang banyak serta berkualitas dari masyarakat umum.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
Berkomunikasi dengan dan memberikan pelayanan bagi anggota masyarakat dalam cara yang profesional.			
<input type="checkbox"/> Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian termasuk tingkat umum kepercayaan terhadap polisi, rata-rata laporan, kepuasan korban kejahatan terhadap (i) hubungan dengan polisi, (ii) tindakan yang diambil oleh polisi, (iii) informasi yang diterima dari polisi, (iv) perlakuan yang diterima, dan (v) pelayanan secara keseluruhan yang diberikan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Kepuasan warga melibatkan hubungan dengan polisi dengan tetap menghormati perlakuan yang adil.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Keluhan dari masyarakat terkait dengan pemberian pelayanan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Anggaran yang diperoleh dari partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan perpolisian masyarakat, termasuk rincian penggunaannya, harus disajikan untuk umum.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
Kerjasama polisi dengan pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam rangka pemolisian komunitas			
<input type="checkbox"/> Kemitraan dengan kepolisian khusus	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Kemitraan dengan penyidik pegawai negeri sipil	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Kemitraan dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA			
Mendefinisikan misi mereka sebagai pelayanan masyarakat dan melindungi hak asasi semua orang, dan berperilaku pantas.			
<input type="checkbox"/> Pelayanan polisi memiliki pernyataan yang tegas untuk melayani dan melindungi hak semua orang.	Pejabat Kepolisian Masyarakat	Kualitatif Kuantitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Standar pelayanan minimum untuk masing-masing kantor / kesatuan (seperti: waktu dalam memberikan tanggapan).	Pejabat Kepolisian Masyarakat	Kualitatif Kuantitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur
Bekerja sama dengan lembaga pengembalian fungsi kepolisian lainnya, selain itu juga mendukung ketaatan mereka terhadap standar integritas dan hak asasi manusia.			
<input type="checkbox"/> Pengaturan hubungan, kerjasama dan tanggung jawab antara Polri dengan kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dibuat dalam pernyataan yang jelas.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Dibuat pengaturan untuk berbagi informasi mengenai kejahatan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
KESAMAAN POLITIK, SOSIAL, EKONOMI			
Organisasi			
Polisi berada di bawah otoritas sipil / presiden.			
<input type="checkbox"/> Arah kebijakan kepolisian termasuk kewenangan penguasa sipil/presiden dan dijadikan acuan bagi kebijakan teknis kepolisian.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Otoritas sipil/presiden menetapkan kebijakan profesionalisme dan kemandirian, serta menjaga akuntabilitas polisi sesuai peraturan perundang-undangan dan menghindari campur tangan yang tidak proporsional terhadap pemolisian.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Satuan kewilayahan Polri mengembangkan kebijakan kepolisian sesuai dengan kebijakan teknis kepolisian dari Kapolri dan tuntutan, harapan dan kondisi daerah setempat. (Kebijakan Pemda, aspirasi masyarakat, dan masalah setempat)	Pejabat Kepolisian Masyarakat	Kualitatif Kuantitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur
Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara polisi dan militer mengenai tugas pokok, fungsi, dan peranannya.			
<input type="checkbox"/> Tugas dan kekuasaan polisi dan militer didefinisikan secara jelas dan dibedakan satu dari yang lain; dan tugas ini harus ditaati.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Polisi dan militer memiliki sistem perintah dan pengendalian yang terpisah dan tidak saling terikat.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Kriteria yang jelas dan tegas serta pembatasan-pembatasan dalam operasi gabungan militer-polisi dituangkan dalam peraturan hukum.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
<input type="checkbox"/> DPR meninjau dan menyetujui peraturan tersebut.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Manajemen			
Manajemen Sumber Daya berorientasi kepada kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian untuk melayani masyarakat			
<input type="checkbox"/> Manajemen kepolisian berdasarkan ketentuan hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.	Pejabat Kepolisian Masyarakat	Kualitatif Kuantitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Manajemen kepolisian ditujukan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengutamakan tindakan pencegahan.	Pejabat Kepolisian Masyarakat	Kualitatif Kuantitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur
Tidak melakukan diskriminasi terhadap tiap kelompok dalam kualifikasi dan proses, kecuali untuk memastikan bahwa pelayanan khusus kepolisian diperlukan untuk kelompok khusus dalam masyarakat.			
<input type="checkbox"/> Kualifikasi minimum untuk menjadi calon anggota didefinisikan dengan jelas, tidak bersifat diskriminatif — secara langsung atau tidak — dan mematuhi.	Pejabat Kepolisian Badan legislatif	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Inisiatif untuk mendorong rekrutmen mencakup seluruh kelompok ras atau suku.	Pejabat Kepolisian Badan legislatif	Kualitatif	Wawancara mendalam
Jelas dan tegas dalam kenaikan pangkat, pembagian pekerjaan dan kebijakan pemberian gaji, peningkatan karir berdasarkan kinerja, dan penggunaan prosedur yang adil dan transparan.			
<input type="checkbox"/> Kebijakan kenaikan pangkat dan pemberian gaji tersedia untuk umum.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Kesempatan untuk maju tersedia untuk semua dan dipublikasikan di antara para petugas kepolisian.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Adanya dewan kebijakan yang representatif yang menyetujui kenaikan pangkat.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Menyediakan pelayanan dan sumberdaya yang sesuai, termasuk upah dan tunjangan, dan memperlakukan polisi dalam cara yang sesuai dengan harga diri mereka.			
<input type="checkbox"/> Gaji polisi sepadan dengan sektor pelayanan sipil lain yang sebanding.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Perbedaan gaji yang masuk akal antara pangkat yang berbeda.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Polisi memperoleh tunjangan khusus yang mencerminkan sifat resiko pekerjaan, termasuk cuti dan cuti sakit, asuransi jiwa dan cacat, pelayanan kesehatan, dan sistem pensiun.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
<input type="checkbox"/> Jumlah jam lembur dan waktu bertugas ditentukan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan anggota polisi berdasarkan ras, etnik atau kelompok lain.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Mendistribusikan sumber daya kepolisian dengan proporsional			
<input type="checkbox"/> Personel dan sumber daya lain dialokasikan secara adil, sesuai dengan faktor-faktor seperti kondisi geografis dan keadaan fisik wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kejahatan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Kualitas kantor polisi dibuat menurut sifat demografi (khususnya profile etnis) dari masyarakat tempat mereka mengabdikan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman di bidang teknis kepolisian melalui penugasan secara berjenjang dan berlanjut.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
	Masyarakat	Kuantitatif	Wawancara terstruktur

Sumber : Diolah dari Leonardo Morino (2002) serta dikombinasikan dengan kerangka yang dikembangkan dalam David Bruce, (2005), *Police that we want : A Handbook of Oversight Police in South Africa*.

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA BAGI PEJABAT KEPOLISIAN

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
SUPREMASI HUKUM & PELAYANAN DEMOKRATIS			
Menghormati dan memegang teguh aturan hukum.			
<input type="checkbox"/> Polisi memiliki kejelasan mengenai parameter hukum untuk praktek operasional seperti (i) penghentian dan pemeriksaan tanda pengenal, (ii) pemanggilan, (iii) penggeledahan, (iv) penangkapan, (v) penyitaan, (vi) penahanan (vii) pemeriksaan, dan pemolisian komunitas	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Ketaatan polisi terhadap parameter hukum untuk praktek operasional, termasuk juga pemolisian komunitas	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Polisi, dalam kebijakan dan operasinya, termasuk pemolisian komunitas, mendukung prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan, keadilan dan profesionalisme .			
<input type="checkbox"/> Di kantor polisi, Kebijakan dan informasi mengenai cara-cara melakukan pengaduan ditampilkan secara jelas.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Petugas polisi diambil sumpah setia untuk menegakkan nilai-nilai.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Secara tegas, pimpinan menanamkan prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan, keadilan dan profesionalisme dalam kebijakan dan operasi, termasuk pemolisian komunitas			
<input type="checkbox"/> Nilai-nilai, seperti pernyataan misi atau pernyataan tentang nilai, kode etik dan aturan kedisiplinan, dimasukkan dalam dokumen inti pelayanan polisi, termasuk pemolisian komunitas	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan, keadilan dan profesionalisme dalam kebijakan dan operasinya melalui berbagai tindakan, termasuk pemolisian komunitas.			
<input type="checkbox"/> Ada pelatihan-pelatihan yang membuat petugas kepolisian dan pegawai lain sadar akan nilai bersama.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Diambil langkah-langkah untuk memperkuat nilai-nilai tersebut melalui komunikasi secara teratur yang diberikan oleh pimpinan, atau dalam arahan kerja oleh pengawas.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Manajemen dan praktek operasional mendukung ketaatan terhadap nilai-nilai tersebut melalui tindakan positif yang ditujukan untuk membantu ketaatan polisi seperti kenaikan pangkat dan penilaian kinerja, melalui evaluasi lain, dan melalui peringatan dan sanksi dalam kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai tersebut.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
AKUNTABILITAS/TRANSPARANSI			
Akuntabilitas Internal			
Memastikan kinerja kesatuan dan perilaku anggota dapat dipertanggungjawabkan.			
<input type="checkbox"/> Memiliki rantai komando yang jelas dan efektif, khususnya dalam pengawasan lini pertama petugas kepolisian.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Memiliki badan pengawas internal di setiap tingkatan kesatuan dengan mekanisme pengawasan yang transparan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Memiliki sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi yang transparan sesuai dengan standar profesional.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Memiliki strategi/perencanaan dan prosedur yang jelas tentang pelaksanaan tugas pokok di setiap tingkatan kesatuan dan menetapkan sasaran kinerja menurut strategi yang ada	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Memiliki sistem pelaporan yang berlaku bagi setiap tingkatan kesatuan dan setiap pejabat kepolisian	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Memiliki sistem penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas perorangan/kesatuan berdasarkan tolok ukur yang telah dibakukan untuk memberikan reward & punishment yang jelas	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Akuntabilitas Kepada Negara			
Memiliki mekanisme penetapan arah kebijakan kepolisian berdasarkan undang-undang.			
<input type="checkbox"/> Adanya arah kebijakan kepolisian yang dibuat oleh otoritas sipil.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Adanya badan yang bertugas menyiapkan bahan untuk penetapan arah kebijakan kepolisian	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Kebijakan teknis kepolisian ditetapkan sesuai arah kebijakan kepolisian yang dibuat oleh otoritas sipil.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Anggota polisi tunduk pada kekuasaan peradilan umum			
<input type="checkbox"/> Anggota Polri tunduk pada kitab undang-undang hukum pidana dan hukum acara pidana.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Anggota Polri tunduk pada hukum perdata	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Anggota Polri tunduk pada hukum tata usaha negara	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa polisi mematuhi kekuasaan pengadilan – termasuk kehadiran untuk bersaksi bila diperlukan; kualitas kesaksian; kualitas kasus yang diajukan ke pengadilan; dalam rangka memenuhi perintah pengadilan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Mekanisme pengawasan kepolisian oleh lembaga legislatif / DPR.			
<input type="checkbox"/> Badan legislatif memiliki komisi khusus untuk pengawasan kebijakan dan pelaksanaan tugas kepolisian sesuai ketentuan perundang-undangan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Keteraturan pengawasan DPR terhadap polisi melalui mekanisme rapat kerja polri dengan DPR. (komisi yang menjadi mitra kerja polri).	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> DPR dengan hak budget menetapkan alokasi anggaran kepolisian dan mengawasi pelaksanaannya.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Pengawasan pelaksanaan anggaran dan manajemen keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			
<input type="checkbox"/> Memiliki satuan organisasi yang membidangi fungsi pengawasan anggaran dan keuangan dan menjadi mitra BPK	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Akuntabilitas kepada Publik			
Respon cepat terhadap panggilan darurat.			
<input type="checkbox"/> Polisi harus memperkenalkan diri dan mengenakan papan atau label nama, atau menunjukkan identitas kepada anggota masyarakat umum.	Pejabat Kepolisian Masyarakat	Kualitatif Kuantitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Waktu tanggapan terhadap panggilan darurat.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Tingkat kepuasan publik terhadap tanggapan polisi untuk keadaan darurat.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Memiliki sistem yang terpercaya untuk mencatat informasi untuk evaluasi kinerja dan terhadap perilaku individual, dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat umum.			
<input type="checkbox"/> Polisi memiliki sistem pencatatan informasi mengenai kinerja dan perilaku anggotanya, dan menyediakan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memastikan atau memperbaiki keandalan sistem ini.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Informasi yang diperoleh melalui sistem ini disediakan untuk badan pengawas dan umum, tanpa memperhatikan apakah hasilnya akan memberikan citra positif terhadap pelayanan polisi atau tidak.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Mendukung pengawasan dari luar dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat pengamat kepolisian, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat perorangan serta komunitas di tempat tugasnya.			
<input type="checkbox"/> Laporan tahunan dan laporan lain tentang kinerja dan perilaku polisi dapat diakses masyarakat umum.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Hubungan antara polisi dan organisasi masyarakat pengamat kepolisian menggambarkan kerjasama, kemitraan yang harmonis dan manajemen yang efektif.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
<input type="checkbox"/> Menanggapi dengan positif permintaan informasi dari forum masyarakat, media dan lainnya.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Petugas Senior bersedia ditemui masyarakat umum dan mendorong adanya dialog.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Terdapat prosedur yang jelas untuk persetujuan penelitian, dan memberikan akses bagi peneliti masalah kepolisian.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Transparansi ditingkatkan misalnya dengan membuat website polisi dengan informasi yang berkualitas: akses terhadap pelatihan polisi oleh anggota organisasi masyarakat pengamat kepolisian atau masyarakat, dan lain-lain.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Akuntabilitas kepada Badan Pengawas Eksternal Independen			
Terdapat badan pengawasan independen untuk menyelidiki pengaduan mengenai polisi, dengan kekuatan hukum, sumber daya anggaran dan staff yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.			
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki kebebasan yang cukup dalam menghadapi segala bentuk campur tangan dan politik dari polisi.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan bahwa tuduhan terhadap polisi diselidiki sebaik-baiknya.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Anggota badan pengawas mendapat perlindungan terhadap intimidasi dari polisi dan pihak yang lain.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki kekuasaan untuk meminta kerjasama dari polisi, termasuk kekuasaan untuk meminta petugas yang tidak disebutkan namanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyelidikan terhadap petugas lain.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki kekuasaan untuk melakukan kunjungan ke kantor polisi tanpa pemberitahuan, menyelidiki fasilitas kepolisian, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penahanan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Polisi memenuhi permintaan informasi dari badan pengawas, kecuali ada alasan mendasar yang membuatnya tidak perlu memberikan jawaban.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Polisi memiliki kewajiban yang jelas dalam menanggapi rekomendasi yang dibuat oleh badan pengawas.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Dibutuhkan badan pengawas pada tingkat lokal (Propinsi/Kabupaten kota/Kecamatan) guna meningkatkan efektivitas pengawasan kepada polisi	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Kerjasama polisi dengan badan pengawas yang bertanggung jawab untuk memantau atau menyelidiki dugaan perilaku polisi yang menyimpang.			
<input type="checkbox"/> Lembaga kepolisian memberikan informasi kepada badan pengawas mengenai langkah-langkah yang diambil menindaklanjuti rekomendasi badan pengawas.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Dukungan aktif polisi bagi lembaga pengawas dalam menjalankan peran pengawasannya.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
KETANGGAPAN (RESPONSIVENESS)			
Menggunakan mekanisme yang efektif dalam dialog polisi-masyarakat, jangkauan yang luas dan kerjasama.			
<input type="checkbox"/> Polisi pada tingkat lokal dan tingkat yang lain berusaha mencari orang dan lembaga yang memiliki peranan menonjol di masyarakat dan mengajak mereka dalam dialog (tercermin dalam pertemuan konsultatif yang rutin dan cakupan kelompok yang bergabung).	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Polisi berusaha mencari dan membangun kemitraan dengan orang atau kelompok yang memiliki potensi untuk membantu dalam kegiatan pencegahan kejahatan (tercermin dalam kemajuan yang dicapai dalam pengurangan masalah kejahatan melalui kemitraan).	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Memanfaatkan pengamanan swadaya masyarakat atau strategi khusus seperti pertemuan sektoral atau patroli jalan kaki.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Petugas polisi berperan serta dalam kegiatan masyarakat.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Menerima informasi yang banyak serta berkualitas dari masyarakat umum.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Berkomunikasi dengan dan memberikan pelayanan bagi anggota masyarakat dalam cara yang profesional.			
<input type="checkbox"/> Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian termasuk tingkat umum kepercayaan terhadap polisi, rata-rata laporan, kepuasan korban kejahatan terhadap (i) hubungan dengan polisi, (ii) tindakan yang diambil oleh polisi, (iii) informasi yang diterima dari polisi, (iv) perlakuan yang diterima, dan (v) pelayanan secara keseluruhan yang diberikan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Kepuasan warga melibatkan hubungan dengan polisi dengan tetap menghormati perlakuan yang adil.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Keluhan dari masyarakat terkait dengan pemberian pelayanan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Anggaran yang diperoleh dari partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan perpolisian masyarakat, termasuk rincian penggunaannya, harus disajikan untuk umum.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Kerjasama polisi dengan pengembalian fungsi kepolisian lainnya dalam rangka pemolisian komunitas			
<input type="checkbox"/> Kemitraan dengan kepolisian khusus	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
<input type="checkbox"/> Kemitraan dengan penyidik pegawai negeri sipil	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Kemitraan dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA			
Mendefinisikan misi mereka sebagai pelayanan masyarakat dan melindungi hak asasi semua orang, dan berperilaku pantas.			
<input type="checkbox"/> Pelayanan polisi memiliki pernyataan yang tegas untuk melayani dan melindungi hak semua orang.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Standar pelayanan minimum untuk masing-masing kantor / kesatuan (seperti: waktu dalam memberikan tanggapan).	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Bekerja sama dengan lembaga pengembalian fungsi kepolisian lainnya, selain itu juga mendukung ketaatan mereka terhadap standar integritas dan hak asasi manusia.			
<input type="checkbox"/> Pengaturan hubungan, kerjasama dan tanggung jawab antara Polri dengan kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dibuat dalam pernyataan yang jelas.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Dibuat pengaturan untuk berbagi informasi mengenai kejahatan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
KESAMAAN POLITIK, SOSIAL, EKONOMI			
Organisasi			
Polisi berada di bawah otoritas sipil / presiden.			
<input type="checkbox"/> Arah kebijakan kepolisian termasuk kewenangan penguasa sipil/presiden dan dijadikan acuan bagi kebijakan teknis kepolisian.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Otoritas sipil/presiden menetapkan kebijakan profesionalisme dan kemandirian, serta menjaga akuntabilitas polisi sesuai peraturan perundang-undangan dan menghindari campur tangan yang tidak proporsional terhadap pemolisian.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Satuan kewilayahan Polri mengembangkan kebijakan kepolisian sesuai dengan kebijakan teknis kepolisian dari Kapolri dan tuntutan, harapan dan kondisi daerah setempat. (Kebijakan Pemda, aspirasi masyarakat, dan masalah setempat)	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara polisi dan militer mengenai tugas pokok, fungsi, dan peranannya.			
<input type="checkbox"/> Tugas dan kekuasaan polisi dan militer didefinisikan secara jelas dan dibedakan satu dari yang lain: dan tugas ini harus ditaati.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Polisi dan militer memiliki sistem perintah dan pengendalian yang terpisah dan tidak saling terikat.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
<input type="checkbox"/> Kriteria yang jelas dan tegas serta pembatasan-pembatasan dalam operasi gabungan militer-polisi dituangkan dalam peraturan hukum.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> DPR meninjau dan menyetujui peraturan tersebut.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Manajemen			
Manajemen Sumber Daya berorientasi kepada kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian untuk melayani masyarakat			
<input type="checkbox"/> Manajemen kepolisian berdasarkan ketentuan hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesucilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Manajemen kepolisian ditujukan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengutamakan tindakan pencegahan.	Pejabat Kepolisian Masyarakat	Kualitatif Kuantitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur
Tidak melakukan diskriminasi terhadap tiap kelompok dalam kualifikasi dan proses, kecuali untuk memastikan bahwa pelayanan khusus kepolisian diperlukan untuk kelompok khusus dalam masyarakat.			
<input type="checkbox"/> Kualifikasi minimum untuk menjadi calon anggota didefinisikan dengan jelas, tidak bersifat diskriminatif — secara langsung atau tidak — dan mematuinya.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Inisiatif untuk mendorong rekrutmen mencakup seluruh kelompok ras atau suku.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Jelas dan tegas dalam kenaikan pangkat, pembagian pekerjaan dan kebijakan pemberian gaji, peningkatan karir berdasarkan kinerja, dan penggunaan prosedur yang adil dan transparan.			
<input type="checkbox"/> Kebijakan kenaikan pangkat dan pemberian gaji tersedia untuk umum.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Kesempatan untuk maju tersedia untuk semua dan dipublikasikan di antara para petugas kepolisian.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Adanya dewan kebijakan yang representatif yang menyetujui kenaikan pangkat.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Menyediakan pelayanan dan sumberdaya yang sesuai, termasuk upah dan tunjangan, dan memperlakukan polisi dalam cara yang sesuai dengan harga diri mereka.			
<input type="checkbox"/> Gaji polisi sepadan dengan sektor pelayanan sipil lain yang sebanding.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Perbedaan gaji yang masuk akal antara pangkat yang berbeda.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
<input type="checkbox"/> Polisi memperoleh tunjangan khusus yang mencerminkan sifat resiko pekerjaan, termasuk cuti dan cuti sakit, asuransi jiwa dan cacat, pelayanan kesehatan, dan sistem pensiun.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Jumlah jam lembur dan waktu bertugas ditentukan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan anggota polisi berdasarkan ras, etnik atau kelompok lain.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Mendistribusikan sumber daya kepolisian dengan proporsional			
<input type="checkbox"/> Personel dan sumber daya lain dialokasikan secara adil, sesuai dengan faktor-faktor seperti kondisi geografis dan keadaan fisik wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kejahatan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Kualitas kantor polisi dibuat menurut sifat demografi (khususnya profile etnis) dari masyarakat tempat mereka mengabdikan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman di bidang teknis kepolisian melalui penugasan secara berjenjang dan berlanjut.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam

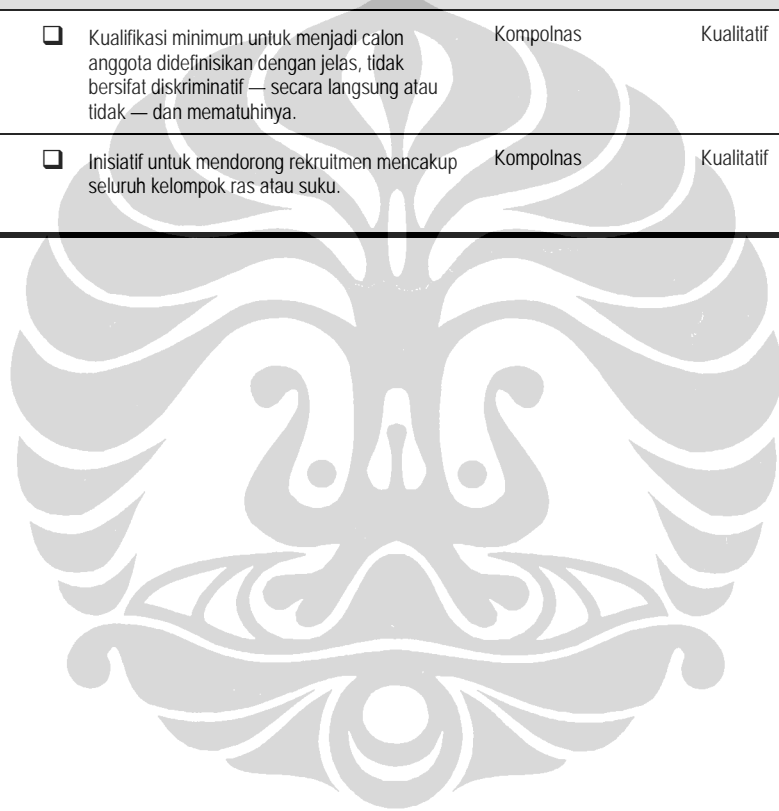
LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA BAGI PEJABAT KOMPOLNAS

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
SUPREMASI HUKUM & PELAYANAN DEMOKRATIS			
Menghormati dan memegang teguh aturan hukum.			
<input type="checkbox"/> Polisi memiliki kejelasan mengenai parameter hukum untuk praktek operasional seperti (i) penghentian dan pemeriksaan tanda pengenal, (ii) pemanggilan, (iii) pengeledahan, (iv) penangkapan, (v) penyitaan, (vi) penahanan (vii) pemeriksaan, dan pemolisian komunitas	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Ketaatan polisi terhadap parameter hukum untuk praktek operasional, termasuk juga pemolisian komunitas	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
AKUNTABILITAS/TRANSPARANSI			
Akuntabilitas kepada Publik			
Mendukung pengawasan dari luar dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat pengamat kepolisian, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat perorangan serta komunitas di tempat tugasnya.			
<input type="checkbox"/> Laporan tahunan dan laporan lain tentang kinerja dan perilaku polisi dapat diakses masyarakat umum.	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Hubungan antara polisi dan organisasi masyarakat pengamat kepolisian menggambarkan kerjasama, kemitraan yang harmonis dan manajemen yang efektif.	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
Akuntabilitas kepada Badan Pengawas Eksternal Independen			
Terdapat badan pengawasan independen untuk menyelidiki pengaduan mengenai polisi, dengan kekuatan hukum, sumber daya anggaran dan staff yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.			
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki kebebasan yang cukup dalam menghadapi segala bentuk campur tangan dan politik dari polisi.	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan bahwa tuduhan terhadap polisi diselidiki sebaik-baiknya.	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Anggota badan pengawas mendapat perlindungan terhadap intimidasi dari polisi dan pihak yang lain.	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki kekuasaan untuk meminta kerjasama dari polisi, termasuk kekuasaan untuk meminta petugas yang tidak disebutkan namanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyelidikan terhadap petugas lain.	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki kekuasaan untuk	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
melakukan kunjungan ke kantor polisi tanpa pemberitahuan, menyelidiki fasilitas kepolisian, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penahanan.			
<input type="checkbox"/> Polisi memenuhi permintaan informasi dari badan pengawas, kecuali ada alasan mendasar yang membuatnya tidak perlu memberikan jawaban.	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan laporan independen.	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki anggaran yang memadai untuk menggaji sejumlah personel dengan keahlian yang sesuai	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Badan pengawas memiliki petugas dengan keahlian yang dibutuhkan untuk tugas yang harus mereka kerjakan.	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Dibutuhkan badan pengawas pada tingkat lokal (Propinsi/Kabupaten kota/Kecamatan) guna meningkatkan efektivitas pengawasan kepada polisi	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
Kerjasama polisi dengan badan pengawas yang bertanggung jawab untuk memantau atau menyelidiki dugaan perilaku polisi yang menyimpang.			
<input type="checkbox"/> Lembaga kepolisian memberikan informasi kepada badan pengawas mengenai langkah-langkah yang diambil menindaklanjuti rekomendasi badan pengawas.	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Dukungan aktif polisi bagi lembaga pengawas dalam menjalankan peran pengawasannya.	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
KESAMAAN POLITIK, SOSIAL, EKONOMI			
Organisasi			
Polisi berada di bawah otoritas sipil / presiden.			
<input type="checkbox"/> Arah kebijakan kepolisian termasuk kewenangan penguasa sipil/presiden dan dijadikan acuan bagi kebijakan teknis kepolisian.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Otoritas sipil/presiden menetapkan kebijakan profesionalisme dan kemandirian, serta menjaga akuntabilitas polisi sesuai peraturan perundang-undangan dan menghindari campur tangan yang tidak proporsional terhadap pemolisian.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Satuan kewilayahan Polri mengembangkan kebijakan kepolisian sesuai dengan kebijakan teknis kepolisian dari Kapolri dan tuntutan, harapan dan kondisi daerah setempat. (Kebijakan Pemda, aspirasi masyarakat, dan masalah setempat)	Pejabat Kepolisian Masyarakat	Kualitatif Kuantitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur
Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara polisi dan militer mengenai tugas pokok, fungsi, dan peranannya.			
<input type="checkbox"/> Tugas dan kekuasaan polisi dan militer didefinisikan secara jelas dan dibedakan satu dari yang lain; dan tugas ini harus ditaati.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
<input type="checkbox"/> Polisi dan militer memiliki sistem perintah dan pengendalian yang terpisah dan tidak saling terikat.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Kriteria yang jelas dan tegas serta pembatasan-pembatasan dalam operasi gabungan militer-polisi dituangkan dalam peraturan hukum.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> DPR meninjau dan menyetujui peraturan tersebut.	Pejabat Kepolisian	Kualitatif	Wawancara mendalam
Manajemen			
Tidak melakukan diskriminasi terhadap tiap kelompok dalam kualifikasi dan proses, kecuali untuk memastikan bahwa pelayanan khusus kepolisian diperlukan untuk kelompok khusus dalam masyarakat.			
<input type="checkbox"/> Kualifikasi minimum untuk menjadi calon anggota didefinisikan dengan jelas, tidak bersifat diskriminatif — secara langsung atau tidak — dan mematuhi.	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Inisiatif untuk mendorong rekrutmen mencakup seluruh kelompok ras atau suku.	Kompolnas	Kualitatif	Wawancara mendalam



LAMPIRAN 5

PEDOMAN WAWANCARA BAGI ANGGOTA DPR (KOMISI III)

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
SUPREMASI HUKUM & PELAYANAN DEMOKRATIS			
Menghormati dan memegang teguh aturan hukum.			
<input type="checkbox"/> Polisi memiliki kejelasan mengenai parameter hukum untuk praktek operasional seperti (i) penghentian dan pemeriksaan tanda pengenal, (ii) pemanggilan, (iii) penggeledahan, (iv) penangkapan, (v) penyitaan, (vi) penahanan (vii) pemeriksaan, dan pemolisian komunitas	DPR	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Ketaatan polisi terhadap parameter hukum untuk praktek operasional, termasuk juga pemolisian komunitas	DPR	Kualitatif	Wawancara mendalam
Akuntabilitas Kepada Negara			
Mekanisme pengawasan kepolisian oleh lembaga legislatif / DPR.			
<input type="checkbox"/> Badan legislatif memiliki komisi khusus untuk pengawasan kebijakan dan pelaksanaan tugas kepolisian sesuai ketentuan perundang-undangan.	DPR	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Keteraturan pengawasan DPR terhadap polisi melalui mekanisme rapat kerja polri dengan DPR.(komisi yang menjadi mitra kerja polri).	DPR	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> DPR dengan hak budget menetapkan alokasi anggaran kepolisian dan mengawasi pelaksanaannya.	DPR	Kualitatif	Wawancara mendalam
KESAMAAN POLITIK, SOSIAL, EKONOMI			
Tidak melakukan diskriminasi terhadap tiap kelompok dalam kualifikasi dan proses, kecuali untuk memastikan bahwa pelayanan khusus kepolisian diperlukan untuk kelompok khusus dalam masyarakat.			
<input type="checkbox"/> Kualifikasi minimum untuk menjadi calon anggota didefinisikan dengan jelas, tidak bersifat diskriminatif — secara langsung atau tidak — dan mematuhi.	DPR	Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Inisiatif untuk mendorong rekrutmen mencakup seluruh kelompok ras atau suku.	DPR	Kualitatif	Wawancara mendalam

LAMPIRAN 6

PEDOMAN WAWANCARA BAGI INFORMAN KHUSUS (PENASEHAT AHLI KAPOLRI/MANTAN PENASEHAT AHLI KAPOLRI/AKADEMISI/PENGAMAT KEPOLISIAN)

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL	SUMBER DATA	PENDEKATAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
SUPREMASI HUKUM & PELAYANAN DEMOKRATIS			
Menghormati dan memegang teguh aturan hukum.			
<input type="checkbox"/> Polisi memiliki kejelasan mengenai parameter hukum untuk praktek operasional seperti (i) penghentian dan pemeriksaan tanda pengenal, (ii) pemanggilan, (iii) penggeledahan, (iv) penangkapan, (v) penyitaan, (vi) penahanan (vii) pemeriksaan, dan pemolisian komunitas		Kualitatif	Wawancara mendalam Wawancara terstruktur
<input type="checkbox"/> Ketaatan polisi terhadap parameter hukum untuk praktek operasional, termasuk juga pemolisian komunitas		Kualitatif	Wawancara mendalam
Secara tegas, pimpinan menanamkan prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan, keadilan dan profesionalisme dalam kebijakan dan operasi, termasuk pemolisian komunitas			
<input type="checkbox"/> Nilai-nilai, seperti pernyataan misi atau pernyataan tentang nilai, kode etik dan aturan kedisiplinan, dimasukkan dalam dokumen inti pelayanan polisi, termasuk pemolisian komunitas		Kualitatif	Wawancara mendalam
Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan, keadilan dan profesionalisme dalam kebijakan dan operasinya melalui berbagai tindakan, termasuk pemolisian komunitas.			
<input type="checkbox"/> Ada pelatihan-pelatihan yang membuat petugas kepolisian dan pegawai lain sadar akan nilai bersama.		Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Diambil langkah-langkah untuk memperkuat nilai-nilai tersebut melalui komunikasi secara teratur yang diberikan oleh pimpinan, atau dalam arahan kerja oleh pengawas.		Kualitatif	Wawancara mendalam
<input type="checkbox"/> Manajemen dan praktek operasional mendukung ketaatan terhadap nilai-nilai tersebut melalui tindakan positif yang ditujukan untuk membantu ketaatan polisi seperti kenaikan pangkat dan penilaian kinerja, melalui evaluasi lain, dan melalui peringatan dan sanksi dalam kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai tersebut.		Kualitatif	Wawancara mendalam
AKUNTABILITAS/TRANSPARANSI			
Akuntabilitas Internal			
Memastikan kinerja kesatuan dan perilaku anggota dapat dipertanggungjawabkan.			
<input type="checkbox"/> Memiliki rantai komando yang jelas dan efektif, khususnya dalam pengawasan lini pertama petugas kepolisian.		Kualitatif	Wawancara mendalam